

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2013 TENTANG
PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Adhi Susanto

(e-mail : adhisusanto@gmail.com)

Pembimbing: Prof. H. Sujianto M.SI

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi peraturan daerah No 1 tahun 2013 tentang Pandai Membaca Al-Quran belum berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan pemerintah Kabupaten Kampar. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk menjadikan masyarakat kabupaten Kampar menjadikan masyarakat yang bernilai agama tinggi, khususnya Kecamatan Bangkinang Kota.

Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal, itu dibuktikan masih banyak sekolah-sekolah yang belum melaksanakan program ini dan masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya Program Pandai Membaca Al-Quran. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tentang Pandai Membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini adalah Partisipasi Masyarakat, Dana/Biaya dan Sarana Prasarana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini.

Abstract

ADHI SUSANTO. Implementation Regulation No. 1 Year 2013 area About Smart Reading the Qur'an in District Bangkinang City Kampar regency. COACH: PROF. H. SUJANTO M.SI

Implementation is derived from the English language is to implement the means to implement. Implementation is the provision of means to implement something that impacts or due to something. Something was done to impact or it may be due to laws, regulations, judicial decisions and policies made by government agencies in the state life. Implementation of local regulation No. 1 of 2013 on Smart Reading Al-Quran and outs of running with the maximum as expected yank Kampar regency government. The purpose of these regulations is to make the public Kampar religion makes people high-value, particularly the District Bangkinang City.

Theoretical concept used by the author is the Policy and Program Implementation. Researchers use qualitative research with descriptive study. In collecting the data, the writer used interview and observation techniques. Authors use informants as sources of information and techniques triangulasi as a source of data authenticity.

Implementation of Regional Regulation No. 1 Year 2013 About Smart Reading Al-Quran in District Bangkinang City Kampar regency has not gone up, it proved there are still many schools that have not implemented these programs and there are still many people who do not know about the program Smart Reading Al - Quran. Factors that affect the implementation of the Regional Regulation No. 1 On good at reading the Koran in the district are the Kampar regency Bangkinang Public Participation Fund / Cost and Infrastructure in mengimplementasian the Regulation.

Keywords: Implementation, Program and Local Regulations

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah untuk belajar memperoleh pengetahuan dan mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan. Oleh karena itu, pengajaran di sekolah adalah salah satu usaha yang bersifat sadar, bertujuan, sistematis dan terarah pada perubahan tingkah laku atau sikap. Perubahan tingkah laku itu dapat terjadi, manakala proses pengajaran terjadi di sekolah.

Bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan dan memilih serta merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan yang merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakannya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur.

Agama islam sebagai pedoman hidup kaum muslim tentunya tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan tuhan saja, tetapi juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah pendidikan.

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya adalah Al-qur'an. Sebagai pokok agama, al-qur'an memegang peranan yang sangat signifikan dalam pembentukan tingkah laku manusia atau pembentukan akhlaq yang mulia. Artinya bahwa, seseorang akan melahirkan sebuah tata nilai yang luhur

dan mulia jika mengikuti sumber dari al-qur'an. Tata nilai itu kemudian melembaga dalam suatu masyarakat dan pada gilirannya akan membentuk sebuah kebudayaan dan peradaban yang islami.

Dalam rangka untuk meningkatkan akhlak dan moral, serta meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kampar, maka dipandang perlu bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati, serta calon mempelai/pengantin pandai membaca Al-Qur'an, yang dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar, sehingga dapat membentuk kepribadian yang paripurna dan dapat mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Maka Pemerintah Kab.Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an. Agar dikeluarkannya perda tersebut untuk meningkatkan kualitas manusia atau menjadikan kebiasaan sehari-hari membaca Al-Qur'an. Adapun Tujuan diadakan perda ini adalah :

- a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia
- b. Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin, beriman, dan bertaqwa
- c. Mempunyai pengetahuan tentang dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah
- d. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari

- e. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Mushollah dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Shalat

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Peraturan Daerah ini adalah:

1. Sebagai acuan dari masyarakat Kabupaten Kampar untuk mencintai dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, khususnya bagi anak didik, pegawai, dan calon mempelai/pengantin, agar dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Tiga sasaran pandai membaca Al-Qur'an bagi Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian yang paripurna dan mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Tabel 1.1.

Persentase Calon Mempelai Yang Pandai Baca Al-Qur'an/Kurang Lancar/Tidak Pandai

N o	Keterangan	20 14	20 15
1	Orang yang pandai baca alqur'an	65 %	75 %
2	Orang yang bisa baca alqur'an	15 %	15 %
3	Orang yang tidak bisa sama sekali baca alqur'an	10 %	10 %
Jumlah		10 0%	10 0%

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kab. Kampar

Berdasarkan Dari tabel 1.1 diatas di kantor urusan agama (KUA) yang pandai membaca Al-Qur'an ,kurang lancar baca Al-Qur'an dan yang tidak pandai baca AL-Qur'an pada tahun 2014-2015 dengan yang mendaftar sebagai calon mempelai di tahun 2014 berkisar 256 dan pada tahun 2015 sebanyak 281 yang mendaftar. Dengan demikian, pada tahun 2015 calon mempelai lebih meningkat yang pandai membaca Al-Qur'an di bandingkan pada tahun di 2014.

Yang di maksud dengan pandai membaca Al-Qur'an yaitu lancar dengan tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang bias membaca Al-Qur'an yaitu kurang mengetahui tentang tawjid yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut

Tabel. 1.2
Data Sekolah SD, SMP dan SMA yang
Kurang Pandai Mengaji dan Pandai

N O	NAMA SEKOLAH	TAHUN 2014		TAHUN 2015	
		YANG KURAN G PAND AI MEMB ACA AL- QUR'A N	YANG PAND AI MEMB ACA AL- QUR'A N	YANG KURAN G PANDA I MEMB ACA AL- QUR'A N	YANG PAND AI MEMB ACA AL- QUR'A N
1	SD 005 Langgini	35 Orang	459 Orang	40 Orang	419 Orang
2	SMP N 1 Bangkinang Kota	8 Orang	973 Orang	13 Orang	960 Orang
3	SMA N 1 Bangkinang Kota	99 Orang	788 Orang	108 Orang	851 Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kampar

Berdasarkan Tabel. 1.2 diatas dapat dilihat bahwa tiap sekolah setiap tahunnya yang kurang pandai membaca al-quran mengalami peningkatan sedangkan yang pandai membaca al-quran mengalami penurunan. Sebaiknya setiap sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA harus menambahkan jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari alquran, selain dari kegiatan tersebut setiap sekolah harus mewajibkan murid yang belum pandai baca alquran untuk belajar membaca alquran di TPQ, mesjid, musholla dan sebagainya. Setiap orang tua juga mewajibkan anak-anaknya untuk belajar membaca alquran di TPA/TPQ, mesjid/ Mushollah dan sebagainya agar

mempunyai pengetahuan tentang dasar hidup beragama islam serta taat dalam melaksanakan ibadah.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan dari segi pegawai di Bangkinang Kota rata – rata mereka telah pandai membaca al-quran.

Dari tiga sasaran Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Alquran peneliti hanya memfokuskan untuk meneliti peserta didik yang pandai/kurang pandai membaca alquran. Karena setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan harus pandai membaca alquran.

Pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dimaksudkan untuk menanamkan keimanan dan ketagwaan bagi Peserta Didik dan Pegawai. Khusus untuk murid SD Kelas 1 sampai dengan Kelas VI wajib belajar Al-Qur'an, sehingga setelah tamat SD murid yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

Bagi Pegawai dan Calon Mempelai/Pengantin wajib mempelajari Al-Qur'an di Masjid, Mushollah dan sebagainya, sehingga dalam melaksanakan tugas baik di kantor maupun di rumah sudah mempunyai akhlak dan kepribadian sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Atas dasar pemikiran yang dimaksud dan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan , serta pengawasan dalam program Pandai Membaca Al-Qur'an.

Sebagaimana fenomena yang terlihat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,

“Implementasi Peraturan daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”

Konsep teori

a. Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksana ini dari sudut pandang **George C.Edward di dalam widodo (2011)** mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berjalan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yaitu:

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Widodo.2011).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Agar proses pelaksanaan kebijakan biar berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

B. Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam

Widodo (2011) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia(staf)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesional dan kompetensi dalam bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

2. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksana kebijakan, sebab

tanpa adanya dukungan anggaran yang memadahi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

2. Informasi dan kewenangan

Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasi suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai yang dikehendaki.

C. Disposisi

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

D. Struktur birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur (SOP). Sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel

b. Program

program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil. Sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa program dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan

partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Untuk menggumpulkan data dan informasi maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Tanggapan respon mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang pandai membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

2. Data Sekunder

Adalah data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada di dinas dan instansi mengenai latar belakang, tugas Pokok dan Fungsi, tujuan, mekanisme dan struktur organisasi Dinas.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa hal – hal penting yang berhubungan dengan penelitian.

Tujuan observasi adalah untuk mengecek atau memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan seperlunya yang dipandang penting dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam pengimplementasiannya dari sudut pandang **George C.Edward di dalam Widodo (2011)** mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berjalan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

b. Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk didalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi yang mencakup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operation Prosedur (SOP).

B. Faktor yang mempengaruhi pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses pengawasan tersebut dapat bersumber pada internal, yang melakukan pengawasan dan yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian

dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan antara lain sebagai berikut :

a) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor pertama yang mempengaruhi penghambatan pengimplementasian peraturan daerah No 1 tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Al-Quran, artinya dilihat dari segi pengetahuan tentang peraturan Daerah ini , karena pengetahuan adalah modal pertama dalam pelaksanaan program ini.

b) Dana/Biaya

Faktor dana dalam melaksanakan implementasi sangat berperan dalam kelancaran proses implementasi agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan implementasi adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya dalam merencanakannya butuh sehari-hari dalam pemerintahan, anggaran operasional ini adalah untuk biaya administrasi umum dan biaya pemeliharaan.

c) Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang Pandai membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang pandai membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki.
2. Adapun indikator yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang pandai membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
 - a. Komunikasi, belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga baik aparat pelaksana maupun masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing.
 - b. Sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis bahwa sumber daya dan perangkat

organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi pelaksanaanya.

- c. Disposisi, hal ini berkaitan dengan sikap dan konsistensi implementor yang terkesan mengabaikan Perda tersebut. Sehingga pelaksanaan upaya penegakan Perda belum continue dan berkelanjutan.
- d. Struktur birokrasi, instansi yang terkait dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pandai membaca Al-Quran serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam Perda tersebut, namun implementor belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Masih ada tumpang tindih pada wilayah kerja masing-masing instansi pelaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Kamar melalui instansi yang terkait dengan Perda tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 Tentang pandai membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tersebut agar memberikan efek jera bagi

masyarakat yang melanggar aturan Perda tersebut.

- b. Diharapkan kepada stakeholder untuk menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Perda sebagai suatu produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Malang : Bumi Aksara.

-----, 2004. *Analisis kebijakan dan formulasi kebijakan*. Malang: Bumi Aksara.

Tangkilisan, Hassel. Nogi. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Gava Media.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.

Syawkani, Dkk. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Gramedia.

Presman Dkk. 1973. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Gramedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Alex Media Komputindo

-----, 2009. *Public Policy*. Jakarta : Alex Media Komputindo.

Sumaryadi. Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta.

Mazmanian Paul Sabatier. 1983. *implementation and public policy*.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Praktik*. Alfabeta. Riau: Pekanbaru.

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang : Bayu Media.

Jones, O. Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali : Jakarta.

Namawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya : Pmn.

Muhammad Afrizal, Wirawan. 2012.